



KEADAAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Rafi Hanif Fajari

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Alamat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Korespondensi penulis: rafihaniffajari009@gmail.com

***Abstrak.** The democracy in question is a country with a democratic system of government. A democratic government is a government that prioritizes the aspirations of all people in the country in every decision-making. Education is needed to create a society where people can thrive in a democratic system of government. And through education, through a better learning system, we can make our society more intelligent, more communicative, and more courageous in expressing opinions. In addition to the development, progress and changes in science and technology, there is still a need for a national education system that includes a curriculum that is able to adapt to the changing times and build a competitive society.*

***Keywords:** Democracy, Education, Technology*

Abstrak. Demokrasi yang dimaksud adalah negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mengedepankan aspirasi seluruh masyarakat di negaranya dalam setiap pengambilan keputusan. Pendidikan diperlukan untuk menciptakan masyarakat di mana masyarakat dapat berkembang dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dan melalui pendidikan, melalui sistem pembelajaran yang lebih baik, kita dapat menjadikan masyarakat kita lebih cerdas, lebih komunikatif, dan lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Selain perkembangan, kemajuan, dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih diperlukan sistem pendidikan nasional yang mencakup kurikulum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan membangun masyarakat yang berdaya saing.

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan, Teknologi

PENDAHULUAN

Kita semua tahu betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, ruang lingkup pendidikan sangatlah luas dan berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Setiap orang harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk bertahan hidup di era pengapuran. Pendidikan dianggap sebagai dasar keberhasilan individu dan kolektif, baik wiraswasta, kelompok, atau organisasi lain. Namun, sebagian pemikir pendidikan berpendapat bahwa pendidikan yang menekankan pada keterampilan dan kecerdasan masih gagal mencapai unsur terpenting dalam pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu diperluas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, John Dewey memberikan sistem pendidikan yang diharapkan dapat menutupi kekurangan sistem pendidikan yang ada guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas

KAJIAN TEORI

Materi Pokok Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi:

Secara garis besar demokrasi adalah demokrasi, artinya segala keputusan mengenai kedudukan negara diserahkan kepada rakyat. Atau sering disebut kebebasan, hal itu tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Singkatnya, bahasa demokrasi adalah pemerintahan kerakyatan atau yang sering disebut dengan *people power*.

Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat ke-16, menyatakan dalam pidatonya di Gettysburg bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diciptakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Menurut pemahaman ini, rakyat mempunyai kekuasaan paling besar dalam pemerintahan karena mereka mempunyai hak yang sama, kesempatan yang sama, dan suara yang sama dalam kebijakan pemerintah. Sistem ini mengatur pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Menurut Aristoteles, kebebasan adalah kebebasan semua warga negara. Menurut Aristoteles, kebebasan ini digunakan untuk berbagi kekuasaan, demokrasi adalah kebebasan, dan prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan semua orang dapat berbagi kekuasaan di negaranya.

2. Ciri – Ciri Demokrasi di Indonesia

A. Demokrasi Langsung

Mereka adalah orang-orang yang secara langsung dapat berdiskusi dan mengambil keputusan mengenai permasalahan kebijakan nasional.

B. Demokrasi Tidak Langsung

Adalah keinginan yang diwakili oleh rakyat yang duduk dalam badan perwakilan (parlemen) rakyat.

Dilihat dasar ideologi yang diikuti:

A. Demokrasi Liberal

Kebebasan individu, atau kebebasan individu *sera*, adalah ideologi yang lebih umum di Barat.

B. Demokrasi Rakyat

Dengan mengutamakan kepentingan umum demokrasi mengabaikan hak politik masyarakat dan kepentingan pribadi.

C. Demokrasi Pancasila

Ciri khas demokrasi yang mencakup aspek politik dan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Prinsip – Prinsip Demokrasi

A. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik

Pemerintahan Konstitusional, Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, Pengawasan Terhadap Administrasi Negara, Pemilihan Umum Yang Bebas, Pemerintahan Yang berdasarkan Hukum.

B. Prinsip non demokrasi (Kediktatoran)

Pemerintah tidak berdasarkan konstitusional, Pemutusan kekuasaan Rule power, Pemilihan umum yang tidak demokratis, Tidak ada atau tidak ada kebebasan berpendapat.

Materi Pokok Pengertian Pendidikan dan Prinsip – Prinsip Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan secara umum bertujuan untuk membuat lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa dapat secara aktif mengembangkan keterampilan dan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan. Masyarakat terdiri dari orang-orang dari berbagai negara dan bangsa.

2. Pendidikan dan Kebebasan

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan rakyat demokratis. Orang harus memahami konsep pasar bebas dan bagaimana fungsi pemerintah demokratis sesuai dengan kerja konstitusi. Pendidikan yang demokratis harus mendidik siswa untuk beradaptasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Atau, setiap orang yang lulus sekolah harus memiliki kemampuan untuk menyadarkan masyarakat dan membekali diri mereka dengan pengetahuan.

3. Paradigma pendidikan

Regulasi, profesionalitas, dan manajemen adalah tiga elemen penting yang perlu diperbarui untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan siswa menjadi dirinya sendiri, menemukan identitas mereka, dan bertindak sesuai keinginan mereka. memenuhi kebutuhan dan

dapat berkembang sehingga mampu membuat pilihan yang logis demi kepentingan banyak orang.

4. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik diperlukan untuk meningkatkan demokrasi dan kerja sama berdasarkan rasa hormat di setiap sekolah. Ini juga harus mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan rencana. Bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan jelas menyatakan bahwa “bahwa kebebasan akademik dan mimbar akademik adalah hak yang dimiliki oleh perguruan tinggi.” Lebih khusus lagi, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian perpustakaan atau studi perpustakaan, yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan atau studi perpustakaan adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari kepustakaan atau dari setiap sumber buku dan karya tulis yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mewujudkan Demokrasi Melalui Pendidikan

Pendidikan luas, dengan jalur keluarga dan jalur sekolah. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi adalah tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan Jhon Dewey (2004) menyatakan bahwa sekolah harus melakukan tiga tugas: (1) memberikan siswa lingkungan yang sederhana dari kebayaan kompleks yang ada, memilih berdasarkan aspek fundamental yang dapat diserap siswa; (2) sejauh unguin menghasilkan hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, menghilangkan hal-hal yang remeh dan tidak berguna dari masa lalu; dan (3) memilih yang terbaik dan memungkinkan siswa menjadi warga negara yang baik.

2. Membangun Sistem Pendidikan Demokratis

Pendidikan berkualitas tinggi hanya dapat dicapai dalam lingkungan yang demokratis, dan lingkungan yang demokratis ini lebih realistis. Sistem pendidikan yang demokrasi berkaitan dengan cara pendidikan dirancang, dibuat, dan dikembangkan sehingga memungkinkan penerapan nilai-nilai dan ciri-ciri demokrasi. Ini juga bersifat umum dalam arti bahwa itu mencakup sistem pendidikan secara keseluruhan, terutama kurikulum, bahan terbuka, sarana dan prasarana, lingkungan siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Proses pendidikan, dsb. Namun, mereka dapat lebih spesifik dan mengelompokkan unsur-unsur tertentu dari sistem pendidikan, seperti kurikulum, materi pembelajaran, atau proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Demokrasi pendidikan adalah kebijakan negara yang sangat diharapkan. Kebijakan yang diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka. Ada perbedaan yang semakin besar antara kelompok yang terdidik dan yang belum terdidik. terhapus, sehingga informasi pembangunan tidak lagi mengganggu. Pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen untuk menyelenggarakan peradilan bagi semua dan semua orang. Oleh karena itu, permasalahan seperti elitisme, kejangkauan pendidikan, dan putus sekolah dapat diselesaikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Penguasaan, P., Dasar, K., Dan, P., Terhadap, P. D., Demokrasi, S., Kelas, S., Sekolah, X. I., Atas, M., Gemolong, N. I., Jannah, J. N., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Maret, U. S. (2011). *Jasmina Noor Jannah*.
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>
- Setiyadi, A. C. (2010). Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey. *At-Ta'dib*, 5(1), 77–102. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v5i1.585>
- UPAYA MENUJU DEMOKRATISASI PENDIDIKAN. (2011). 27.